



Dampingi Pelaku Wisata di DIY, Bukan Ditutup Paksa

TAJUK

Pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat di DIY menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di wilayah ini. Alhasil, sejumlah objek wisata di DIY kini sudah dibuka. Di sisi lain arus kunjungan wisatawan juga mulai masuk ke DIY. Kendati demikian, sebagian besar objek wisata di DIY belum dibuka karena belum memenuhi syarat dibukanya objek wisata. Antara lain syarat diterapkannya Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) yakni proses pemberian sertifikat

kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya sebagai penjamin kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Praktisnya di lapangan, sejumlah objek wisata yang masih ditutup tetap nekat buka mengingat lonjakan kunjungan wisatawan. Buntutnya, petugas gabungan menutup paksa warung makan dan hotel di sejumlah objek wisata yang belum diizinkan untuk buka. Penutupan tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15/2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur DIY Nomor 17/INSTR/2021. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menyebut warung makan dan hotel yang berada di obwis yang masih ditutup jumlahnya ratusan. Noviar mengatakan penutupan warung makan dan hotel itu dilakukan di 33 titik objek wisata dan sebagian besar adalah wisata pantai. Penutupan dilakukan karena objek wisata tersebut belum boleh beroperasi di masa PPKM Level 3 ini. Bahkan wisatawan yang lolos masuk ke objek wisata tersebut terpaksa

dibubarkan dan diminta pulang. Tidak hanya itu, ribuan kendaraan wisatawan juga diputar balik di pintu masuk objek wisata. Faktanya upaya paksa membubarkan wisatawan dan menuju tempat usaha di kawasan wisata tak bisa sepenuhnya dilakukan, mengingat jumlah antara personel keamanan dengan pelaku wisata yang tak sebanding. Kami menilai, alangkah lebih baik bila pemerintah fokus membantu pelaku usaha di kawasan wisata atau pengelola objek wisata untuk bisa memenuhi ketentuan sertifikasi CHSE daripada mengerahkan

personel menutup paksa tempat usaha di kawasan wisata. Selama ini, sebagian pengelola wisata masih kesulitan untuk memenuhi sertifikasi CHSE. Padahal, semakin banyak objek wisata dibuka dan memenuhi sertifikasi CHSE tentu menguntungkan banyak pihak karena perekonomian warga tetap berjalan, namun tetap dengan protokol kesehatan ketat. Banyak dari pemilik warung yang menggantungkan hidup dari objek wisata saja, mereka selama ini sudah kesulitan sehingga perlu dipikirkan nasibnya. Pelaku wisata perlu

didampingi dengan baik dan serius agar bisa menciptakan iklim wisata di DIY yang aman dan sesuai protokol kesehatan. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendampingi objek wisata. Terutama bagaimana agar ketentuan aplikasi Peduli Lindungi bisa diterapkan. Sementara bila aplikasi ini tidak bisa diterapkan karena tidak semua tempat wisata tersedia jaringan bisa ditempuh langkah lain. Misalnya dengan diskresi tanpa penerapan aplikasi asal pemerintah memastikan protokol kesehatan berjalan dan gunakan model *screening* lain.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005